

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN PERASINAL SEBAGAI
ALAT PENGAWASAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : AHMAD IRSAL
NPM :1305170016
PROGRAM STUDI: AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Ahmad Irsal, 1305170016, Analisis Anggaran Realisasi Pendapatan Operasional Pemerintah Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji anggaran pada Pemerintah Kota Medan berdasarkan : anggaran realisasi pada periode anggaran 2011-2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh pada kantor Pemerintah Kota Medan. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: pendapatan selama 5 tahun tidak konsisten dimana pada tahun 2011 anggaran sebesar 1.110.469.593.763 dan realisasinya menurun sebesar 995.072.572.141. dan dimana selisihnya sebesar (115.397.021.622) dan persentasenya (89,61). Dan di tahun 2012 anggaran mengalami kenaikan sebesar 1.954.454.835.594 dimana realisasinya mengalami penurunan sebesar 1.147.901.461.607 dan selisihnya mengalami kenaikan sebesar (806.553.374.446) dan dimana persentasenya mengalami penurunan sebesar (71,99). Di tahun 2013 anggaran mengalami kenaikan sebesar 1.578.247.819.724 dimana realisasinya mengalami kenaikan sebesar 1.206.169.709.147 selisih mengalami penurunan sebesar (372.078.110.577) persentasenya mengalami kenaikan sebesar (76,42). Di tahun 2014 anggaran mengalami kenaikan sebesar 1.678.116.623.125 begitu juga dengan realisasinya mengalami kenaikan sebesar 1.384.246.114.729 dan dimana selisihnya mengalami penurunan sebesar (293.690.508.396) persentasenya mengalami kenaikan sebesar (82,49). Di tahun 2015 anggaran mengalami kenaikan sebesar 1.794.704.774.012 begitu pula dengan realisasinya sebesar 1.489.728.189.088 dan selisih yang didapat dan sebesar (304.976.584.924) dan persentase juga mengalami kenaikan sebesar (83,01).

Kata Kunci : *anggaran, realisasi*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, barokah serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Anggaran Pendapatan Operasional Sebagai Alat Pengawasan Pada Pemerintah Kota Medan”**.

Tidak lupa shalawat berangkaian salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat semoga penulis serta pembaca selalu berada didalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti. Amin YaRabba' alamin.

Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian tugas Penelitian Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Semenjak mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhirnya dapat menyelesaikan proposal ini.

Selama dalam pelaksanaan perkuliahan ini sampai akhirnya penulis dapat melakukan penyelesaian skripsi banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, serta doa yang tak pernah berhenti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari pada itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka:

1. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan doa-doa beserta motivasi, dorongan kasih sayang orang tua sangat terasa hangat didalam

benak, hati, pikiran, sehingga penulis dapat mengimplementasikan didalam penulisan didalam penyelesaian proposal ini.

2. Bapak Dr. Agussani, MAP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, MM, M.Si Selaku. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dosen pembimbing Iksan Abdullah, SE, M.SI. yang sangat berperan besar bagi penulis, karena bimbingan, saran motivasi beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta staff biro fakultas Ekonomi & Bisnis Jurusan Akuntansi, yang telah banyak memberikan ilmu pendidikan kepada penulis, selama didalam proses belajar mengajar dikampus.
8. Terima kasih kepada Kantor Pemerintah Kota Medan yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengadakan penelitian dalam hal menyelesaikan proposal ini.
9. Kepada teman-teman saya yang telah memberikan support serta motivasi baik motivasi moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

10. Seluruh teman teman Akuntansi A Pagi yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu semoga peran aktif kalian menjadi catatan tinta suci disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penyelesaian proposal ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, *Amin Ya Robbal Alamin.*

Medan, Oktober 2017

Penulis

AHMAD IRSAL

1305170017

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teoris.....	8
1. Anggaran.....	9
1.1. Pengertian Anggaran.....	9
1.2. Tujuan dan Manfaat Anggaran.....	9
1.3. Fungsi Anggaran.....	13
1.4. Jenis-Jenis Anggaran.....	17
1.5. Faktor-Faktor Mempengaruhi Anggaran.....	21
1.6. Hubungan Anggaran dengan Akuntansi.....	23

2. Anggaran Pendapatan.....	27
3. Keuangan Daerah.....	28
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	30
5. Pendapatan Daerah.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Berfikir.....	39

BAB III METODE PENELITIAN.....42

A. Pendekatan Penelitian	42
B. Definisi Operasional Variabel.....	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....45

A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan.....	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Laporan realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Medan.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap organisasi yang berorientasi mencari laba maupun tidak, sangat memerlukan perencanaan yang berguna untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan harus menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan tersebut, salah satu cara perusahaan dapat merelisasikan laba/rugi adalah dengan cara merencanakan pendapatan dan beban. Penganggaran ialah proses penyusunan penganggaran, yang dimulai dari pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasikan data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Anggaran dalam suatu perusahaan merupakan kebijakan yang cukup handal dalam menentukan keberlangsungan hidup suatu perusahaan, sebab anggaran disusun dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, keadaan yang sedang terjadi dan ramalan yang akan datang.

Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun berdasarkan program dan tujuan yang telah disahkan untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam suatu unit moneter (uang). Perusahaan besar maupun kecil seyogyanya membuat anggaran karena karena penganggaran penting untuk membuat

perencanaan dan pengendalian. Perencanaan melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu organisasi. Sedangkan pengendalian melihat ke belakang, yaitu melihat hasil kerja dan membandingkan dengan rencana yang telah diterapkan. Hasil dari perbandingan ini akan menghasilkan varian, varian harus di analisis dan dicari sebabnya kemudian digunakan untuk memperbaiki perencanaan, anggaran dan pelaksanaan.

Pada umumnya setiap perusahaan menyusun anggaran sebagai alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan hasil yang sesungguhnya.

Menurut M. Nafarin (2012, hal. 19) “Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”.

Anggaran mempunyai dua peran penting di dalam perusahaan, disuatu sisi anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan (*planning*) dan disuatu sisi lagi anggaran berperan sebagai alat untuk pengendalian (*control*) jangka pendek bagi suatu perusahaan. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan antara hasil sesungguhnya yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil sesungguhnya berbeda secara

signifikan dari rencana, tindakan tertentu harus diambil untuk melakukan revisi yang perlu terhadap rencana.

Anggaran merupakan suatu tolak ukur bagi perusahaan untuk menilai apakah perusahaan sudah mampu mengelola anggarannya secara efektif dan efisien. Pada kenyataan sebenarnya tidak jarang ditemukannya adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi yang dicapai. Jika anggaran yang disusun dengan realisasinya terdapat penyimpangan maka penyimpangan tersebut harus dianalisis lebih jauh, apakah penyimpangan tersebut disebabkan karena realisasi yang lebih besar dari anggaran atau realisasi yang lebih kecil dari anggaran.

Objek penelitian penulis adalah Pemerintah Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional, bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara. Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar. Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan pada Pemerintah Kota Medan untuk periode 2011-2015, masih ditemukan beberapa realisasi pendapatan yang tidak sesuai dengan sudah direncanakan.

Tabel I.I**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2011	1.110.469.593.763	995.072.572.141	(115.397.021.622)	(89,61)
2012	1.954.454.835.594	1.147.901.461.607	(806.553.374.446)	(71,99)
2013	1.578.247.819.724	1.206.169.709.147	(372.078.110.577)	(76,42)
2014	1.678.116.623.125	1.384.246.114.729	(293.690.508.396)	(82,49)
2015	1.794.704.774.012	1.489.728.189.088	(304.976.584.924)	(83,01)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Secara operasional, menteri dalam negeri telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan kepmendagri nomor 13 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sehingga setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan tranparansi laporan keuangan.

(Mardiasmo,2005) Penyusunan anggaran di publik merupakan suatu proses yang cukup rumit. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor privat. Anggaran pada sektor privat merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik. Sebaliknya pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibayari dari uang publik.

Berdasarkan hasil tabel I.I dapat dilihat bahwa pendapatan operasional selama 5 tahun tidak konsisten dimana ada kenaikan dan penurunan pada tahun 2011 selisih sebesar (115.397.021.622) dimana persentasenya sebesar (89,61) dan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar (806.553.374.446) dimana persentasenya juga mengalami penurunan sebesar (71,99) pada tahun 2013 selisih mengalami kenaikan (372.078.110.577) sementara persentasenya mengalami penurunan yaitu sebesar (76,42) pada tahun 2014 selisih mengalami kenaikan sebesar (293.690.508.396) dan persentasenya mengalami penurunan sebesar (82,49) dan pada tahun 2015 selisih mengalami kenaikan sebesar (304.976.584.924) dan persentasenya mengalami hal yang sama sebesar (83,01).

Menurut harahap (2001, hal. 223) “Dalam mekanisme penerapan anggaran, salah satu teknis yang diterapkan adalah analisis penyimpangan. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasi, perbedaan antara anggaran dengan realisasi ini disebut dengan penyimpangan. Bila anggaran telah dianggap sebagai standar yang sudah benar dan akurat, maka prinsip kita harus mengusahakan agar realisasi harus sama dengan anggaran. Artinya penyimpangan diusahakan nol atau tidak mungkin, karena anggaran merupakan suatu yang ideal yang dicapai pada waktu itu”.

Dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi maka dapat dilihat berapa besar yang telah direncanakan tersebut menyimpangan. Jika terjadi penyimpangan maka hendaknya diarahkan agar kegiatan selanjutnya tidak

menyimpang dan dicari penyebab terjadinya penyimpangan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Harahap (2001, hal. 14) “Untuk mengetahui penyimpangan dari rencana maka harus melakukan perbandingan antara realisasi dengan anggaran”.

Berdasarkan latar belakan dan uraian di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Analisis Anggaran Realisasi Pendapatan Operasional Pemerintah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Rendahnya serapan anggaran yang sudah ditetapkan selama 5 tahun pada pemerintah Kota Medan.
2. Tingginya anggaran yang tidak terpakai di atas batas torelansi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa realisasi pendapatan operasional tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan pada Pemerintah Kota Medan?
2. Apa penyebab anggaran tidak tercapai pada Pemerintah Kota Medan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa pendapatan operasional tidak mencapai anggaran yang ditetapkan pada Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pendapatan operasional pada Pemerintah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan anggaran dan realisasi pendapatan pada Pemerintah Kota Medan.

- b. Bagi Perusahaan,

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merencanakan serta mengawasi anggaran dan realisasi pendapatan guna untuk meminimalisir resiko kesalahan dalam penyusunan anggaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

c. Bagi peneliti

Selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut, terutama bagi peneliti yang melakukan penelitian berkaitan dengan anggaran dan realisasi pendapatan yang lebih komprehensif dan akurat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian teori

1. Anggaran

1.1 Pengertian Anggaran

Penganggaran berbeda dengan anggaran dan perencanaan berbeda dengan rencana. Penganggaran adalah proses menyusun anggaran, sedangkan anggaran adalah hasil dari penganggaran. Perencanaan adalah proses menyusun rencana, sedangkan rencana adalah hasil dari perencanaan. Anggaran sangat penting dalam operasi perusahaan, anggaran terdiri dari serangkaian taksiran-taksiran yang dapat dipakai sebagai satu program kerja untuk menjalankan kegiatan perusahaan pada satu periode, khususnya pada masa yang akan datang.

Menurut Hansen dan Mowen (2009, hal. 423) mengatakan “anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya”.

Menurut Julita dan Jufrizen (2012, hal. 8) “anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan”.

Menurut M. Nafarin (2007, hal.11) ”Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satu jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu yang tertentu

dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Anggaran ialah tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi, pada umumnya disusun secara tertulis.

Menurut Garrison, Noreen dan Brewer (2007, hal.4) “Anggaran adalah rencana terperinci tentang pemerolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode tertentu. Anggaran menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang formal. Tindakan penyusunan anggaran disebut penganggaran (*budgeting*)”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Anggaran

a. Tujuan Anggaran

Anggaran diperlukan karena ada tujuan dan manfaatnya, anggaran sangat bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat anggaran dapat dijelaskan seperti berikut ini.

Menurut M Nafarin (2007, hal.19) terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.

2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
4. Merasionakan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Menampung, menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Menurut Dr. Darsono Prawironegoro dan Dr. Ari Purwanti, M. Ak (2013, hal. 116) tujuan anggaran antara lain:

1. Memaksa manajer membuat rencana kerja.
2. Tolak ukur mengevaluasi kerja.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara manajer.
4. Membantu mengambil keputusan.

b. Manfaat Anggaran

Anggaran bermanfaat untuk mengkoordinasi dan menganalisa segala operasi yang sudah direncanakan manajemen perusahaan. Dalam anggaran sudah disebutkan apa-apa saja yang dicapai sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai pelaksanaan operasi dalam mencapai tujuan perusahaan.

Menurut M. Nafarin (2007, hal. 19-20) anggaran mempunyai manfaat, antara lain:

- a. Semua kegiatan dapat mengarah padan pencapain tujuan bersama.
- b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
- c. Dapat memotivasi karyawan menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.
- d. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- e. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
- f. Alat pendidikan bagi manajer.

Menurut Charles T. Horngren, dkk (2008, hal. 215) “Anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen. Jika dikelola dengan baik, sebuah anggaran akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Mendorong perencanaan strategis dan pelaksanaan rencana tersebut.
- b. Menjadi kerangka kerja untuk menilai kinerja.
- c. Memotivasi, koordinasi dan komunikasi diantara berbagai sub unit dalam perusahaan.

Menurut Munandar (2001, hal. 13) anggaran memiliki tiga kegunaan pokok antara lain:

a. Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.

b. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan saling mendukung dan saling bekerjasama dengan baik untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan.

c. Sebagai Alat Pengawasan Kerja

Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan.

Anggaran disamping memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki beberapa kelemahan, seperti yang dikatakan M. Nafarin (2007, hal. 22) antara lain:

- a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
- b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat.
- c. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka tidak nyaman dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

1.3 Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran merupakan salah satu alat bagi manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Adapun fungsi anggaran menurut Nafarin (2007, hal.28) sebagai berikut:

a. Fungsi Perencanaan

Salah satu fungsi perencanaan adalah menentukan rencana belanja dan sumber dana yang ada seefisien mungkin. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran lain. Dengan demikian anggaran dapat bermanfaat membantu manajemen untuk meneliti dan mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan financial. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Fungsi Pelaksanaan

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan yang berwenang (terutama dalam hal keuangan). Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggaran atau tidak menyimpang dari anggaran, anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam menjabai tujuan (laba). Anggaran penting untuk menyelaraskan setiap bagian kegiatan divisi, seperti divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi umum.

Apabila salah satu divisi (departemen) saja tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang direncanakan, maka divisi lain juga tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai rencana. Dengan demikian, tiap divisi harus melaksanakan tugasnya secara selaras, terarah dan terkoordinasi sesuai dengan yang direncanakan atau yang telah ditetapkan dalam anggaran.

c. Fungsi pengawasan

Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian (*controlling*). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara:

1. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran).
2. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Anggaran dijadikan pegangan sebagai alat pengawasan oleh manajer yang bertanggung jawab menjalankan operasi untuk mengadakan penilaian dari hasil yang dicapainya. Dapatan sesungguhnya yang diperoleh maupun beban sesungguhnya yang dikorbankan dapat dinilai baik atau buruk bila dikaitkan dengan data yang telah dianggarkan dan perubahan kondisi sejak anggaran disusun.

Menurut Gunawan dan Marwan (2008, hal. 50) “Anggaran mempunyai fungsi yang pada dasarnya sama, yakni dalam hal *planning, coordinating dan control*”.

Adapun uraian fungsi anggaran adalah sebagai berikut:

a. Dalam Bidang Perencanaan

1. Mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan studi dan penelitian-penelitian.
2. Mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan guna menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan.
3. Untuk membantu dan menunjang kebijaksanaan-kebijaksanaan.
4. Menentukan tujuan-tujuan perusahaan
5. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia.
6. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif.

b. Dalam Bidang Pelaksanaan

1. Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan.
2. Menghubungkan aktifitas perusahaan dengan trend dalam dalam dunia usaha.
3. Menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-program perusahaan.
4. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi.

c. Dalam Bidang Pengawasan

1. Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran.
2. Untuk pencegahan secara umum pemborosan-pemborosan.

Menurut M . Fuad, dkk (2001, hal. 7) menyatakan bahwa fungsi anggaran terbagi dua, yaitu:

a. Fungsi Perencanaan

Untuk memberikan petunjuk kepada manajemen dalam pengambilan keputusan

yang bersifat operasional.

b. Fungsi Pengawasan

Suatu kegiatan yang diperlukan untuk mengusahakan agar tujuan, rencana, kebijakan dan standar yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik dan semaksimal mungkin.

Selain itu, menurut Mulyadi (2001, hal .502) mengatakan fungsi anggaran sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan kerja.
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang.

- c. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan akan menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas.
- d. Anggaran berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan sebagai perbandingan hasil operasi sesungguhnya.
- e. Anggaran berfungsi sebagai pengendalian yang memungkinkan manajemen menuju bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
- f. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien.

1.4 Jenis-Jenis Anggaran

Ada beberapa jenis anggaran yang ada di dalam perusahaan, tergantung pada kebutuhan perusahaan perbedaan jenis anggaran bagi masing-masing perusahaan dikarenakan perbedaan pada bidang usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan.

Terdapat beberapa jenis anggaran yang diungkapkan Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2005), sebagai berikut:

1. Anggaran Operasi

Merupakan anggaran yang berisi pendapatan dan biaya-biaya dalam satu periode.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal menyatakan proyek-proyek modal yang telah disetujui, ditambah jumlah sekaligus untuk proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan tingkat yang lebih tinggi.

3. Anggaran neraca

Anggaran neraca menunjukkan implikasi neraca dari keputusan-keputusan yang tercakup dalam anggaran operasi maupun anggaran modal.

4. Anggaran Laporan Arus Kas

Anggaran laporan arus kas menunjukkan beberapa banyak uang yang dibutuhkan selama tahun tersebut yang akan dipasok oleh laba ditahan dan sumber-sumber luar lainnya.

Menurut Nafarin (2007, hal. 31) anggaran dikelompokkan dalam beberapa sudut pandang, yaitu:

1. Menurut dasar penyusuna, anggaran terdiri dari:
 - a. Anggaran variabel (*variabel budget*), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.
 - b. Anggaran tetap (*fixed budget*), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu.

Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari:

- a. Anggaran periodik (*periodic budget*), yaitu anggaran yang disusun dalam satu periode tertentu. Pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode tahun anggaran.
 - b. Anggaran kontiniu (*continuous budget*), yaitu anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat.
2. Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari:
- a. Anggaran jangka pendek (*short-range budget*), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek, anggaran jangka pendek disebut juga dengan anggaran taktis.
 - b. Anggaran jangka panjang (*long-range budget*), adalah anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut dengan anggaran modal (*capital budget*). Anggaran jangka panjang tidak harus berupa anggaran modal, anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek disebut juga anggaran strategis.
3. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari:
- a. Anggaran operasional (*operational budget*), yaitu anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi contoh: Anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik dan anggaran beban usaha.

- b. Anggaran keuangan (*fenancial budget*), yaitu anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Contohnya: anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, anggaran neraca.
4. Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari:
 - a. Anggaran konprehensif (*konprehensive budget*), yaitu rangkaian dari berbagai jenis anggaran yang disusun lengkap. Anggaran konprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap.
 - b. Anggaran parsial (*partially budget*), yaitu anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja.
 5. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari:
 - a. Anggaran tertentu (*appropriation budget*), yaitu anggaran yang diperlukan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.
 - b. Anggaran kinerja (*parformance budget*), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi (perusahaan), misalnya untuk menilai apakah biaya (beban) yang dikeluarkan masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

Menurut Robert N. Anthony (2003, hal. 5) ada beberapa jenis anggaran yang umum, jenis anggaran ini sama dengan jenis pusat pertanggung jawaban yaitu:

1. Anggaran Pendapatan

Suatu anggaran pendapatan berisi proyek penjualan unit, dikaitkan dengan perkiraan harga jual. Anggaran ini merupakan unsur anggaran yang paling penting dan juga unsur yang dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian yang benar.

2. Anggaran Biaya

Anggaran biaya dibagi menjadi dua jenis, antara lain:

- a. Anggaran yang mengangkat biaya yang dapat diperhitungkan secara teknis dipusat tanggung jawab dimana keluaran (*output*) dapat diukur.
- b. Anggaran yang berhubungan dengan biaya yang dipertimbangkan dipusat-pusat pertanggung jawaban dimana keluaran (*output*) tidak dapat diukur.

3. Anggaran Rugi atau Laba

Anggaran rugi atau laba adalah suatu rencana laba tahunan yang terdiri dari serangkaian angka-angka proyeksi keuangan tahunan yang akan datang disertai dengan jadwal pendukungnya.

1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran

Dalam melakukan penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keadaan anggaran tersebut Menurut Julita dan Jufrizen (2012, hal. 13-14) ada dua faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, antara lain:

- a. Faktor intrernal, yaitu data informasi dan pengalaman yang terdapat di perusahaan itu sendiri.
- b. Faktor eksternal, yaitu data informasi dan pengalaman yang terdapat diluar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan.

Penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor internal antara lain:
 - a. Penjualan tahun-tahun lalu
 - b. Kebijakan perusahaan yang terhubung dengan harga jual, syarat pembayaran, barang yang dijual, seluruh distribusi dan sebagainya.
 - c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan.
 - d. Tenaga kerjan yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya (kuantitatif) maupun keterampilan dan keahlian (kualitatif).
 - e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan.
 - f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan.
 - g. Kebijakan-kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik dibidang pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi maupun personalia.
2. Faktor-faktor eksternal, antara lain:
 - a. Keadaan persaingan.
 - b. Tingkat pertumbuhan penduduk.

- c. Tingkat penghasilan masyarakat.
- d. Tingkat pendidikan masyarakat.
- e. Tingkat penyebaran penduduk.
- f. Agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- g. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan.
- h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran berasal dari faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor-faktor tersebut dapat diantisipasi lebih awal dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.

1.6 Hubungan Anggaran Dengan Akuntansi

Akuntansi bagi suatu perusahaan merupakan suatu bahasa perusahaana (*language of buisness*). Artinya, dengan akuntansi orang dapat mengetahui keadaan perusahaan seperti keadaan besar kecilnya perusahaan, keadaan kesehatan keuangan perusahaan, keadaan luasnya kegiatan perusahaan, keadaan maju mundurnya perusahaan. Dengan demikian akuntansi merupakan alat informasi agar orang mengerti dan mengetahui tentang keadaan perusahaan. Alat informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi. Ada dua laporan keuangan yang pokok di dalam perusahaan, yaitu laporan laba/rugi yang berkaitan dengan anggaran operasional dan anggaran neraca yang berkaitan dengan anggaran keuangan. Laporan keuangan lainnya seperti, laporan perubahan

modal, laporan sumber dan penggunaan kas serta laporan sumber dan penggunaan data.

Anggaran operasional adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran laba rugi. Anggaran laba/rugi adalah anggaran berupa daftar yang disusun secara sistematis tentang pendapatan (*revenues*) dan beban (*expenses*), rugi dan laba yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Anggaran neraca adalah anggaran berupa daftar yang disusun secara sistematis tentang aktiva, utang dan modal dari suatu organisasi pada saat tertentu.

Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi yang dihasilkan akuntansi merupakan suatu realisasi (aktual) yang akan diperbandingkan dengan anggaran (rencana). Agar dapat memperbandingkan antara realisasi dengan anggaran maka rekening-rekening yang dipergunakan dalam akuntansi harus sama dengan rekening-rekening yang dipergunakan dalam penyusunan anggaran suatu anggaran harus mengikuti format laporan akuntansi yang berkaitan dengan operasi, input, output dan posisi keuangan yang digunakan perusahaan.

Metode-metode dan teknik-teknik yang diterapkan dalam akuntansi harus diterapkan dalam penyusunan anggaran, dengan demikian seorang penyusun anggaran mutlak harus menguasai metode dan teknik akuntansi terutama dalam penyusunan anggaran laporan laba/rugi dan anggaran neraca. Anggaran dalam beberapa hal didasarkan pada data-data historis yang sebagian besar dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pengawasan menyangkut pengukuran hasil-hasil yang telah direalisasikan.

Secara sederhana, akuntansi diartikan sebagai suatu cara sistematis untuk melakukan pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisaan serta melakukan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa financial yang terjadi dan yang dilakukan oleh perusahaan. Akuntansi menyajikan data-data historis, menyajikan peristiwa-peristiwa financial yang terjadi dari hari kehari secara teratur dan sistematis. Sedangkan budget menyajikan data taksiran-taksiran untuk jangka waktu tertentu yang akan datang.

Bilamana dihubungkan, maka terlihat bahwa antara budget dan akuntansi memiliki hubungan yang erat. Julita dan Jefrizen (2012, hal. 16) mengatakan hubungan anggaran dengan akuntansi, yaitu:

- a. Akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan taksiran-taksiran (*forecasting*) yang akan dituangkan dalam budget yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dengan demikian akuntansi sangat bermanfaat di dalam penyusunan budget (fungsi pedoman kerja).
- b. Akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan budget nantinya dari hari ke hari. Dengan demikian akuntansi menyajiakan data realisasi pelaksanaan budget secara lengkap. Data realisasi menyajikan data realisasi pelaksanaan budget inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam taksiran budget itu sendiri untuk melakukan penilaian kerja perusahaan. Dengan kata lain, dengan membandingkan antara data akuntansi dan budget dapat diadakan

penilaian apakah perusahaan telah bekerja secara sukses atau kurang sukses.

Oleh karena itu, data akuntansi sangat diperlukan untuk menyusun budget dan sangat diperlukan untuk dibandingkan dengan budget dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan kerja, maka semua teknik pencatatan dan semua sistematik yang dipakai dalam akuntansi harus semua dan sejalan dengan teknik serta sistematika yang dipakai dalam budget.

Menurut M. Nafarin (2007, hal. 17) penganggaran memang berkaitan secara unik dengan sistem akuntansi dalam hal:

- a. Komponen keuangan dari suatu anggaran yang umumnya disusun dalam suatu format akunting.
- b. Penganggaran berkaitan erat dengan akunting manajemen, yaitu berupa akunting harga pokok standar akunting penentuan biaya variabel (*variable costing*). Penganggaran juga berkaitan dengan akunting manajemen.
- c. Akuntansi laporan keuangan mencatat transaksi dimasa lalu, sedangkan penganggaran mencatat transaksi dimasa depan, dalam hal ini anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan transaksi keuangan.
- d. Untuk membandingkan anggaran dengan realisasi diperlukan data yang dihasilkan oleh akunting perusahaan.
- e. Penganggaran merupakan perencanaan akunting, sedangkan akunting keuangan merupakan pelaksanaan akunting.

- f. Akunting keuangan memberikan masukan data historis yang relevan terutama untuk tujuan analisis dalam pengembangan anggaran.

2. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh pendapatan yang ada di perusahaan untuk masa yang akan datang pendapatan berhubungan dengan penambahan dalam sumber pendapatan yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Bagi perusahaan industri dan perusahaan dagang pendapatan diperoleh dari penjualan barang dagangnya, sedangkan bagi perusahaan jasa pendapatan diperoleh dari penjualan jasanya yang berupa ongkos dari jasa yang diberikan.

Istilah pendapatan disebut juga dengan penghasilan, dalam istilah asing disebut sebagai *revenue*. Pada umumnya para akuntansi berkeyakinan bahwa pendapatan adalah hasil dari kegiatan produktif, dan oleh karena itu diperoleh atau direalisasikan secara kontiniu. Anggaran pendapatan menggambarkan beberapa anggaran yang diterima sebagai akibat yang dilakukan oleh penjualan dan penerimaan pada periode yang akan datang, yang meliputi data-data diantaranya adalah jenis produk yang dijual, volume produksi yang dijual, harga pokok per unit dan wilayah pemasaran (jika diperlukan). anggaran pendapat yang dibuat akan membantu untuk mencapai harapan dengan sistem perencanaan dan pengendalian yang efektif dan efisien.

Anggaran pendapatan merupakan suatu pedoman kerja bagi perusahaan dalam pencapaian tujuan yaitu pencapaian laba yang maksimal. Penyusunan

anggaran pendapatan perusahaan ini mempunyai sistem yang harus diterapkan guna kelancaran usaha dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut dibutuhkan kinerja operasi yang efektif dan efisien agar anggaran pendapatan benar-benar dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dalam pencapaian tujuan.

Anggaran pendapatan menggambarkan jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dan biaya apa yang akan mengurangi sehingga perusahaan mampu membuat perencanaan yang baik dengan pengendalian dan pengawasan yang baik untuk mencapai target yang diharapkan.

3. Keuangan Daerah

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Menurut Memesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang tersebut di dalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Halim (2004: 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang—barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana pengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan pengurusan khusus atau sering juga disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/ keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Aktivitas Anggaran dan (f) Taat Asas”.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Daerah

Bagi seorang akuntan anggaran dipandang sebagai sebuah cara untuk menelusuri keuangan pemerintah, karena dari uraian yang terdapat dalam anggaran terlihat secara jelas penggunaan dari uang negara sehingga dapat ditelusuri apa saja dan berapa banyak barang-barang yang dimiliki negara sebagai kekayaan negara, akibat adanya investasi pemerintah dalam anggaran negara. Sedangkan bagi ahli ekonomi anggaran adalah suatu alat untuk memperlancar atau menghambat terhadap produksi barang dan jasa. Menurut pandangan ahli ekonomi bahwa peranan anggaran sangat menentukan bagi perkembangannya suatu organisasi perusahaan, yang berarti dapat meningkatkan keuntungan bagi pemiliknya. Lain halnya menurut ahli Administrasi Negara, anggaran merupakan cara pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara untuk membiayai program-program negara, berbeda dari sudut pandang bahwa dengan anggaran maka program-program pemerintah akan berjalan, demikian pula besar kecilnya anggaran juga mempengaruhi keberhasilan program-program pemerintah.

Menurut Glenn A. Welsch dalam Adhik (2008) anggaran adalah suatu bentuk *statement* dari padarencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk dalam periode itu. Sedangkan Menurut M. Marsono anggaran dalam Dwi Eka (2011) suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa

depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Menurut Mardiasmo (2002: 62), anggaran publik berisi rencana yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Sedangkan menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGH), saat ini Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut:

Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SA, 2005: 104) yang dimaksud dengan anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

5. Pendapatan Daerah

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP, 2005: 107), Pendapatan adalah semua rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 bahwa Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah menurut pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim (2002), dalam bukunya yang berjudul “ Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah” beliau menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dan pendapatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 TENTANG Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

- a) Pajak Provinsi

Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, (ii) Bea balik nama bermotor kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan diatas air, (iii) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas (i) pajak hotel, (ii) pajak restoran, (iii) pajak hiburan,, (iv) pajak reklame, (v) pajak penerangan jalan, (vi) pajak pengambilan bahan galian golongan C, (vii) pajak parkir.

c) Retribusi, Retribusi ini dirinci menjadi : (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi perizinan Tertentu.

d) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- i. Bagian laba perusahaan milik daerah
 - ii. Bagian laba lembaga keuangan bank
 - iii. Bagian laba lembaga keuangan non bank
- Bagian laba atas pernyataan modal/investasi

3. Dana Perimbangan, Menurut PP No 55 Tahun2005: Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari mana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan adalah dana yang

berasal dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana perimbangan terdiri atas (Halim, 2004:65).

- a) Dana bagi hasil, dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan, bea hak atas tanah dan bangunan dan dan bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam manusia yaitu pemberian hak atas tanah negara.
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal, (kebutuhan fiskal kapasitas dan fiskal daerah) dari alokasi dasar. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Porsi Dau antara provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu (Hali, 2004: 65), besarnya dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBD berdasarkan masing-masing bidang kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dalam dalam APBD. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah

tertentu untuk mendanai kegiatan khususnya yang merupakan unsur daerah.

- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kelompok di atas pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005: Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana, darurat.

DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mereferensi dari beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel II.I

Penelitian terdahulu

Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rezky Fitri	2014	Analisis Anggaran Pendapatan Operasi Dalam Menilai Kinerja Manajer Pusat Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan.	Kinerja manajer pusat pendapatan belum maksimal, hal ini disebabkan anggaran pendapatan belum terealisasikan dengan baik sesuai yang direncanakan perusahaan.

Fatimah	2014	<p>Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Batubara.</p>	<p>Efektivitas Pendapatan pada badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara belum berjalan dengan baik. Ketidak efektifan anggaran pendapatan disebabkan karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu adanya parkir liar, dimana pendapatan tersebut seharusnya dapat menjadi Pendapatan Asli Anggaran Daerah (PAD).</p>
Khairunisa	2014	<p>Analisis Anggaran Penjualan Tiket Sebagai Alat Pengawasan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divre 1 Sumatera Utara.</p>	<p>Anggaran penjualan tiket sebagai alat pengawasan pada PT. Kereta Api (Persero) Divre 1 Sumatera Utara belum berfungsi dengan baik, terlihat bahwa masih terdapat penyimpangan (unfavorable) yang terjadi dari tahun 2010-2012.</p>

Marvina	2011	Analisis anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian kinerja manajer pada PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa	Hasil penelitian yang dilakukan adalah peranan anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian kinerja manajer pada PT Perkebunan Nusantara Tanjung Morawa sudah berfungsi secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya penetapan indikator kunci manajer sebagai pembahasan yang dilakukan manajer dengan bawahan apabila terjadi kenaikan-kenaikan biaya dari yang dianggarkan.
---------	------	---	--

Ahmad Suryadi	2013	Peran Anggaran Dalam Menilai Kinerja Manajer Pusat Pendapatan Pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) Medan.	Peran anggaran mempengaruhi kinerja manajer pusat pendapatan dalam pencapaian target laba dan realisasi anggaran. Kinerja manajer pusat pendapatan pada pusat pendapatan pelayanan usaha unit Galangan Kapal dinilai tidak baik, sebab anggaran pendapatan belum dapat direalisasikan dengan baik terlihat dari pencapaian target anggaran yang tidak pernah terlaksana dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sehingga menimbulkan penyimpangan yang tidak menguntungkan.
------------------	------	---	--

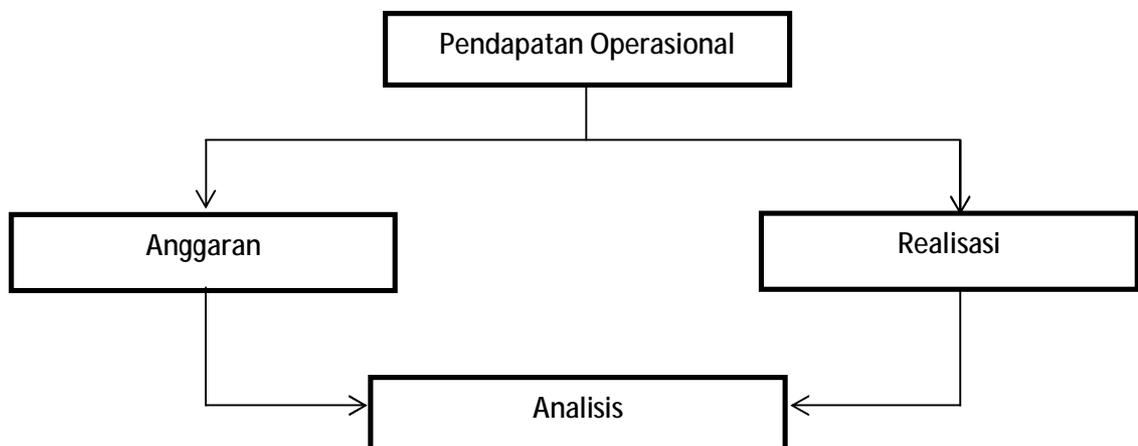
C. Kerangka Berfikir

Pada setiap organisasi yang berorientasi mencari laba maupun tidak sangat memerlukan perencanaan yang berguna untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan tersebut. Salah satu cara perusahaan dapat merealisasikan laba/rugi adalah dengan cara merencanakan pendapatan dan beban selain itu, perusahaan juga harus mampu meningkatkan pendapatan dan laba dengan cara meningkatkan volume penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya. Dalam hal ini penelitian ingin melihat kemampuan perusahaan dalam menjalankan anggaran pendapatan dan melihat sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan berdasarkan rencana (anggaran) yang sudah ditetapkan. Analisa yang dilakukan terhadap laporan keuangan (laba/rugi) akan mengarahkan kepada penarikan kesimpulan tentang kondisi keuangan perusahaan.

Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun berdasarkan program dan tujuan yang telah disahkan untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam suatu unit moneter (uang). Sedangkan realisasi adalah hasil nyata yang dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan. Anggaran dan realisasi ini digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan.

Anggaran yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan apa yang menjadi penyebab terjadinya selisih yang tidak menguntungkan dan tindakan koreksi apa yang harus dilakukan guna mencegah terjadinya selisih yang tidak menguntungkan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk membuat skema paradigma kerangka pemikiran dan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Berikut ini gambar skema paradigma kerangka pemikiran.



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Deskriptif

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

B. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah anggaran dan realisasi pendapatan. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun berdasarkan program dan tujuan yang telah disahkan untuk jangka waktu tertentudan umumnya dinyatakan dalam satuan unit moneter (uang). Sedangkan realisasi adalah hasil nyata yang dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan.

Anggaran dan realisasi ini digunakan sebagai salah satu alat untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menjalankan anggaran dan mengetahui sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan berdasarkan rencana (anggaran) yang telah ditetapkan. Anggaran yang sudah disusun dan ditetapkan sebelumnya dibandingkan dengan realisasi yang dihasilkan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Kantor Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis NO. 2. Waktu penelitian dilakukan pada Juni s/d Oktober 2017. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tabel perincian jadwal kegiatan penelitian.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juni 2017				Juli 2017				Agustus 2017				September 2017				Oktober 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal										■										
5	Riset											■	■								
6	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
8	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dan bilangan berupa laporan keuangan (laba/rugi), dimana data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Untuk mendukung

variabel yang akan diteliti, digunakan data dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Pemerintah Kota Medan. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu laporan anggaran dan realisasi Pemerintah Kota Medan 2011-2015

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan Kota Medan dari tahun 2011-2015.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelola, menginterpretasikan, menganalisis, menjelaskan dan menafsirkan data sehingga memberikan informasi data dan gambaran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini tentang anggaran dan realisasi pendapatan. Analisis data adalah cara-cara mengelola data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan dan untuk melihat komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya selisih yang tidak menguntungkan antara anggaran dengan realisasi pendapatan.

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dari perusahaan yang berupa laporan keuangan (laporan laba/rugi) tahun 2011 sampai dengan 2015.
2. Penulis mengelola data dengan cara membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai oleh perusahaan.
3. Kemudian penulis menghitung selisih yang dihasilkan dari hasil perbandingan antara anggaran dengan realisasi tersebut.
4. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan mengenai penyebab terjadinya selisih yang tidak menguntungkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Data

- a. Penyusunan anggaran yang ditetapkan pada Pemerintah Kota Medan.

Anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun berdasarkan program dan tujuan yang telah disahkan untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan unit moneter (uang). Jika dilihat dari prosesnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran pada Pemerintah Kota Medan karena rendahnya serapan anggaran yang sudah ditetapkan, disebabkan oleh adanya APBD dengan dilakukannya kebijakan otonomi daerah maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah tersebut.

Dalam Pengawasan Laporan Realisasi Anggaran merupakan bagian dari laporan Keuangan Pemerinta Daerah, jumlah dan biaya produksi perlu di anggarkan terlebih dahuludimana anggaran akan memberikan manajemen suatu proyeksi yang dapat dipercayai mengenai pengawasankegiatan produksi yang akan dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil sebenarnya atau pelaksanaan opsional perusahaan dengan anggaran yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan.

Pengawasan Laporan Realisasi pada Pemerintah Kota Medan belum berfungsi dengan baik, hal ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran yang ada dalam pendapatan asli daerah (PAD).

b. Penyebab anggaran tidak tercapai

Faktor penyebab tidak terrealisasinya target PAD 2016 bahkan dan menurun dibanding 2015, serta apakah realisasi PAD Rp 1,5 triliun sudah hasil maksimal atau masih terjadi kebocoran disektor pajak daerah dan retribusi daerah dapat dijelaskan bahwa kami sadari hasil itu belum maksimal, disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Dapat dilihat pada tabel dibawah rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Medan pada tahun 2011 sampai dengan 2015.

Tabel IV.I

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah kota medan

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2011	1.110.469.593.763	995.072.572.141	(115.397.021.622)	(89,61)
2012	1.954.454.835.594	1.147.901.461.607	(806.553.374.446)	(71,99)
2013	1.578.247.819.724	1.206.169.709.147	(372.078.110.577)	(76,42)
2014	1.678.116.623.125	1.384.246.114.729	(293.690.508.396)	(82,49)
2015	1.794.704.774.012	1.489.728.189.088	(304.976.584.924)	(83,01)
Total	8.115.993.646.218	6.223.118.046.712	(1.892.695.599.965)	(403,52)

B. Pembahasan

Berdasarkan tabel IV.1 bahwa pendapatan selama 5 tahun tidak konsisten dimana pada tahun 2011 anggaran sebesar 1.110.469.593.763 dan realisasinya menurun sebesar 995.072.572.141. dan diman selisihnya sebesar (115.397.021.622) dan persentasenya (89,61). Dan di tahun 2012 anggaran mengalami kenaikan sebesar 1.954.454.835.594 dimana realisanya mengalami penurunan sebesar 1.147.901.461.607 dan selisihnya mengalami kenaikan sebesar (806.553.374.446) dan dimana persentasenya mengalami penurunan sebesar (71,99). Di tahun 2013 anggaran mengalami kenaikan sebesar 1.578.247.819.724 dimana realisasinya mengalami kenaikan sebesar 1.206.169.709.147 selih mengalami penurunan sebesar (372.078.110.577) persentasenya mengalami kenaikan sebesar (76,42). Di tahun 2014 anggaran mengalami kenaikan sebesar 1.678.116.623.125 begitu juga dengan realisasinya mengalami kenaikan sebesar 1.384.246.114.729 dan dimana selisihnya mengalami penurunan sebesar (293.690.508.396) persentasenya mengalami kenaikan sebesar (82,49). Di tahun 2015 anggaran mengalami kenaikan sebesar 1.794.704.774.012 begitu pula dengan realisanya sebesar 1.489.728.189.088 dan selisih yang didapat dan sebesar (304.976.584.924) dan persentase juga mengalami kenaikan sebesar (83,01). Dari total 2011 sampai dengan 2015 anggaran pendapatan operasional sebesar 8.115.993.646.218 dan realisasi pendapatan operasionalnya selama dari tahun 2011 sampai 2015 sebesar 6.223.118.046.712 dimana selisih yang didapat selama kurun waktu 5 tahun ini sebesar (1.892.695.599.965) dan total persentasenya (403,52).

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, dalam standar Akuntansi Pemerintah (SAP, 2005 : 107), pendapatan adalah semua rekening kas umum negara/ daerah yang menambah ekuitas dan lancar dan periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali pemerintah.

Sesuai peraturan pemerintah no 105 tahun 2000 bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas negara periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah menurut pasal 5 ayat (2) Undang-undang no 33 tahun 2004 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim (2002 dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah”, beliau menyatakan bahwa Pendapatan Asli (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber Ekonomi Asli Daerah adapun kelompok pendapatan asli daerah menjadi empat jenis pendapatan terdiri dari :

- 1) Pendapatan Daerah
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- 1) Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah”.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- Jasa giro.
- Pendapatan bunga.
- Keuangan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh Daerah.

a. Fungsi pengawasan

Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian (*controlling*). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara:

1. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran).
2. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Anggaran dijadikan pegangan sebagai alat pengawasan oleh manajer yang bertanggung jawab menjalankan operasi untuk mengadakan penilaian dari hasil yang dicapainya. Dapatan sesungguhnya yang diperoleh maupun beban sesungguhnya yang dikorbankan dapat dinilai baik atau buruk bila dikaitkan dengan data yang telah dianggarkan dan perubahan kondisi sejak anggaran disusun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis uraian teori tentang pembahasan terhadap data-data yang diperoleh penulis mengenai anggaran realisasi sebagai alat pengawasan biaya pada Pemerintah Kota Medan akan disajikan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penyusunan anggaran Pemerintah Kota Medan sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, Dalam laporan anggaran dan realisasi operasional tingginya anggaran yang tidak terpakai melebihi batas toleransi realisasinya. Dimana pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 terjadi selisih yang tidak baik dimana tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Medan.
2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat faktor penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan anggaran dan realisasi berdasarkan data yang di input pada Pemerintah Kota Medan khususnya pada bagian akuntansi. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan anggran dan realisasi ini dibutuhkan, pegawai instansi memerlukan kelengkapan data inilah, pegawai instansi yang sudah bertanggung jawab dalam penyusunan laporan anggaran dan realisasi akan menjalankan penyusunan dengan baik dan lancar agar tercapai sasaran yang ditemukan.

B. Saran

1. Dalam penyesuaian anggaran perlu perkiraan hal-hal atau kejadian yang dimasa yang akan datang. Dalam jangka waktu tertentu anggaran perlu direvisi kembali atau disesuaikan dengan biaya yang wajar, agar kecil kemungkinan penyimpangan biaya yang terjadi pada perusahaan.
2. Sebaiknya dalam melaksanakan pengawasan biaya harus lebih teliti, artinya pengawasan biaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan meliputi unsur-unsur biaya, dengan mengevaluasi anggaran tidak hanya meliputi pos-pos yang memiliki penyimpangan yang besar saja tetapi juga memperhatikan dan menganalisa secara menyeluruh.
3. Sebaiknya Pemerintahan harus meningkatkan pengawasan terhadap anggaran dan realisasi Perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut harus diawasi dengan ketat dan penyimpangan yang terjadi harus dianalisis guna menindaklanjuti penyimpangan yang telah dilakukan agar proses pengawasan perusahaan secara keseluruhan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suryadi (2013). *Analisis Anggaran Dalam Menilai Kinerja Manajer Pusat Pendapatan Pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Perser) Medan*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fe, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Charles T. Horngren, Dan Foster (2008). *Akuntansi Biaya Dengan Penekanan Manajerial*, Jakart: Penerbit Selemba Empat.
- Darson Dan Purwanti, Ari (2008). *Penganggaran Perusahaan, Mitra Wacana Media*: Jakarta.
- Fatimah (2014). *Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fe Universitas Negeri Padang.
- Gunawan Dan Marwan (2008). *Busniess Budget, Edisi Kedua, Jakarta : Mitra Wacana*.
- Hansen Dan Nower (2009). *Akuntansi Manajerial, Edisi Kedelapan*, Jakarta: Selemba Empat.
- Harahap (2001). *Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap Edisi Satu, Cetak Kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haruman, Tendi Dan Rahayu Sri (2007). *Penyusunan Anggaran Perusahaan, Edisi Kedua*, Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Hongren (2008). *Akuntansi Biaya Penekanan Manajerial Edisi Kesebelas*, Ahli Bahasa : Desi Andharini.
- Julita (2012). *Budgeting : Pedoman Pengkoordinasian Dan Pengawasan Kerja*, Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis.
- Khairunnisa (2014). *Analisis Anggaran Penjualan Tiket Sebagai Alat Pengawasan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divre 1 Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010-2012*. Skripsi .
- Munandar, M (2007). *Budgeting : Perencanaan Pengkoordinasian Dan Pengawasan kerja, Edisi Satu*. BPFE : Yogyakarta.
- M. Nafarin (2007). *Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi*. Jakarta : Selemba Empat.
- Rezky Fitri (2014). *Analisis Anggaran Pendapatan Operasional Dalam Menilai Kinerja Manajer Pusat Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*. Skripsi Rudianto (2009). *Penganggaran*. Jakarta :Erlangga.
- Shim Dan Siegel (2008). *Budgeting : Pedoman Lengkap Langkah-Langkah Anggaran*. Jakarta : Erlangga.